

Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan (Studi Sistem Bagi Hasil Perikanan di Wilayah Madura)

Muhammad Saidi

Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep

ABSTRACT

This research aims to develop the model of economic empowerment of fishing communities with a focus of study for fishery system practiced fishing communities, the fisherman owner (skipper) with fishermen cultivators (labor). Research conducted in a number of locations in the coastal region of Madura which includes Bangkalan, Sampang, Pamekasan and Sumenep with a wide range of revenue-sharing system. Qualitative research method using a phenomenological approach. Data was collected through in-depth interviews and direct observation in the field. The data were analyzed qualitatively phenomenological, with the implied meaning uncovering what is seen, felt, experienced and/or do the informants and investigators, and also calculates the quantitative results between fishermen and fishermen owner cultivators, fishery production value do with fishing income per year and per month in household wellbeing of fishermen. Results of this research get that: (1) the distribution of revenues fishery is conducted with a profit-sharing between fishermen owners with tenant fishermen, but the results are applied to the Madurese community almost everything is not in accordance with the provisions of the law No.16/1964, just in Coastal Ambunten, Sumenep with a variation of the results in accordance with its provisions; (2) almost all fishermen tenants in Madura according to World Bank criteria and classified should not prosperous or poor, and (3) model of improvement that can improve the economic of fisher families are models that do by financiers/marketers (pangamba'). Financiers/marketer (pangamba') gives some compensation to fishermen who became his partner and the compensation results into venture capital.

Keywords: Profit Sharing System, Economic Empowerment, Fishermen

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia belakangan ini mulai populer ketika sistem ekonomi yang ada dianggap tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan (masyarakat). Bahkan ketika sistem ekonomi kerakyatan di negeri ini disebarluaskan secara politis yang menganggap sistem perekonomian modern gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Basis ekonomi kerakyatan adalah rakyat kebanyakan (populer) yang secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Kegiatan ekonomi kerakyatan dikembangkan untuk lebih mengedepankan dan memberdayakan masya-

rakat dengan berasaskan kekeluargaan dan berkedaulatan rakyat.

Indikator yang menonjol dalam sistem ekonomi kerakyatan adalah perilaku partisipatif dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi serta meningkatkan kapasitas sampai dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal kemandirian, ekonomi kerakyatan jauh lebih mandiri dibanding dengan sistem ekonomi modern. Padahal sistem ekonomi kerakyatan hanya mengeksplorasi sumber daya alam (SDA). Salah satu subsektor dari sektor ekonomi kerakyatan adalah subsektor perikanan. Wilayah laut Indonesia sebagai SDA yang sangat luas, dan permintaan ikan pada pasar

dunia yang terus meningkat, baik untuk konsumsi makanan maupun tepung ikan, mendorong usaha perikanan bisa memenuhi permintaan pasar dalam dan luar negeri. Jika produksi ikan cukup memadai, hasil perikanan dapat menjadi komoditas ekspor yang utama.

Membicarakan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, khususnya di wilayah Madura selalu berkait erat dengan nelayan (pelaku) dan sistem perikanan. Salah satu sistem upah yang dipraktekkan masyarakat nelayan adalah sistem bagi hasil perikanan. Nelayan penggarap berbagi hasil dengan nelayan pemilik. Oleh karena keberadaan ekonomi masyarakat nelayan yang tidak banyak bergeser pada arah peningkatan maka nelayan cenderung bukan lagi jenis pekerjaan yang menjanjikan. Tidak sedikit nelayan yang beralih profesi lain. Penurunan jumlah nelayan ini disebabkan oleh pencemaran kawasan perairan, liberalisasi kawasan pesisir. Tingginya tingkat pencemaran di laut membuat jumlah ikan berkurang karena habitatnya mulai rusak dan tercemar. Sektor pariwisata mengusir nelayan di wilayah pariwisata sering kali menuntut ketiadaan nelayan, misalnya di Bali, Wakatobi, dan Raja Ampat. Nelayan dilarang menangkap ikan dengan alasan wilayah pariwisata, akan mencemari, dan sebagainya.

Fenomena di atas bermuara pada kesejahteraan masyarakat nelayan yang cenderung memprihatinkan. Padahal di era reformasi ini model ekonomi kerakyatan termasuk sektor perikanan menjadi pusat perhatian di negeri ini. Masyarakat nelayan menjadi objek isu yang diperebutkan oleh banyak kalangan (terutama oleh para politisi), meskipun realita di lapangan jauh panggang dari api. Pada kenyataannya, masyarakat nelayan tetap sebagai masyarakat miskin yang kumuh dan tidak berdaya.

Kerimpangan sistem bagi hasil, distribusi pendapatan dan pembagian pendapatan diduga cukup besar dan meluas di antaranya terjadi pada sektor perikanan. Nelayan penggarap yang pekerja pada sektor perikanan cenderung berada di bawah kekuasaan nelayan pemilik. Tidak heran kalau kemudian ada pendapat, bahwa masyarakat nelayan (penggarap) adalah

paradog dari masyarakat miskin. Hampir tidak pernah didengar bahwa nelayan penggarap adalah salah satu kelompok masyarakat yang pendapatannya bisa dikelompokkan sebagai masyarakat berekonomi menengah ke atas.

Berangkat dari fenomena di atas, maka model pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang terfokus pada sistem bagi hasil yang dipraktekkan masyarakat nelayan Madura menarik untuk diteliti. Untuk itu, peneliti mengkaji model pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di wilayah Madura, dengan pusat kajian bagi hasil perikanan.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Kerakyatan

Konvensi ILO tahun 1989 mendefinisikan ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi rakyat. Rakyat di sini berarti orang banyak, bukan perseorangan. Pada prinsipnya, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang dibangun dan dikembangkan oleh orang banyak dan untuk kepentingan mereka.

Menurut Dawam Rahardjo, ekonomi kerakyatan adalah istilah yang relatif baru. Istilah ini mulai diperkenalkan oleh Prof. Sarbini Sumawinata, guru besar FE UI pada 1985. Menurut Sarbini, ekonomi kerakyatan adalah komponen ekonomi dari ideologi Sosialisme Kerakyatan yang mencakup berbagai sektor kehidupan, bertolak dari suatu konsep politik kebudayaan yang berintikan kebebasan, pembebasan, dan kemajuan yang menganggap Marxisme dan Komunisme adalah ajaran yang ketinggalan zaman.

Mubyarto mengajukan ajaran ekonomi alternatif yang disebutnya sebagai Ekonomi Pancasila. Ia sangat kritis terhadap pakar ekonomi yang bermazhab Amerika. Mubyarto lebih memilih ekonomi Pancasila yang diberinya nama 'ekonomi kerakyatan'. Lebih jauh Mubyarto mengatakan: Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkeadilan rakyat, bermoral Pancasila, dan me-

nunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.

Ekonomi kerakyatan berseberangan dengan ekonomi liberalis atau neoliberalisme, dan sosialisme-stalinis. Menurut Dawam Rahardjo, konsep ekonomi kerakyatan melawan dominasi korporasi kapitalis monopoli, dan menentang Sosialisme-Stalinis, di mana negara mendominasi perekonomian masyarakat. Ekonomi kerakyatan tidak hanya melawan sistem pasar bebas, tapi juga menentang etatisme. Dalam hal kemandirian, ekonomi kerakyatan jauh lebih mandiri dan hanya bersandar pada SDA, dan hanya mengeksplorasi tidak mengeksploitasi SDA yang ada. Oleh karenanya, ekonomi kerakyatan lebih akrab dengan alam lingkungan tempat mereka tinggal.

Profesi Nelayan

Dalam pemahaman yang umum, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang tinggal di dekat pantai atau pesisir. Oleh karena bertempat tinggal di pesisir pantai, hampir semua penduduk bermata pencarian nelayan. Mata pencarian nelayan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perikanan, berupa: proses penyediaan rumah ikan, peralatan penangkapan, proses penangkapan, penjualan, dan seterusnya/

Beberapa teori mengatakan, profesi nelayan sebagai pilihan yang tidak bisa ditolak oleh seseorang atau sekelompok orang disebabkan tidak adanya peluang kerja di daratan (*push factor theory*). Dalam hal ini, profesi nelayan sebagai profesi pilihan terburuk ketika tidak ada pilihan profesi lainnya. Profesi ini tidak menjanjikan pendapatan yang membuat keluarga sejahtera, atau menjauhkan nelayan dari asumsi sebagai masyarakat miskin yang kumuh dan merana. Pendapat lain mengatakan, profesi nelayan diminati karena dianggap pekerjaan yang menarik (*pull factor theory*). Dianggap menarik karena pekerjaan itu dilakukan di tengah laut lepas dengan hamparan air yang memukau dan tanpa batas. Pendapat yang agak bersahabat adalah profesi nelayan bersifat *given*, dimana profesi nelayan menjadi *the way of life* yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebagai pekerjaan yang turun-temurun, profesi ini sulit ditinggalkan oleh

generasi-generasi berikutnya. Oleh karenanya, profesi ini tidak dipandang dari untung dan ruginya, tetapi hanya sebagai warisan pekerjaan yang perlu dilestarikan.

Kesejahteraan Keluarga dan Kemiskinan

Makna kesejahteraan merujuk pada *keadaan yang baik*, kondisi manusia dalam keadaan makmur, [sehat](#) dan [damai](#). Dalam istilah ekonomi dihubungkan dengan keuntungan benda. Dalam [kebijakan sosial](#), [kesejahteraan sosial](#) merujuk pada jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Amerika Serikat, sejahtera merujuk pada [uang](#) yang dibayar oleh [pemerintah](#) kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat [bekerja](#) atau keadaan pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Istilah kesejahteraan dalam ekonomi erat hubungannya dengan kemiskinan. Tidak sejahtera berarti miskin, dan jika sejahtera memiliki makna cukup atau kaya. Setidaknya, sejahtera berarti kebutuhan dasar dalam keluarga terpenuhi.

Dua faktor yang memengaruhi kesejahteraan keluarga, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern berupa: jumlah anggota keluarga, tempat tinggal (papan), keadaan sosial ekonomi keluarga, dan keadaan ekonomi keluarga. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa dan ketentraman batin anggota keluarga yang datangnya dari luar lingkungan keluarga. Faktor-faktor itu di antaranya factor manusia atau pihak lain di luar anggota keluarga, faktor alam dan faktor ekonomi negara. Untuk yang terakhir, faktor ekonomi negara, bukti empiris menunjukkan sebagaimana hasil penelitian David Mc Clelland, bahwa kesejahteraan penduduk di suatu negara dipengaruhi oleh perkembangan ekonominya.

Ada beberapa tahapan kelompok keluarga sejahtera sesuai dengan keadaannya. (1) Keluarga Prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*), seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan. (2) Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, seperti kebutuhan

akan pendidikan, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. (3) Keluarga Sejahtera II, adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan pengembangannya, seperti mampu menyisihkan pendapatannya untuk keperluan lain. (4) Keluarga Sejahtera III, adalah keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Kemiskinan Nelayan

Bank Dunia menetapkan kemiskinan menjadi dua kelompok: sangat miskin, dan miskin. Dikategorikan *sangat miskin* jika pendapatan di bawah US \$1 per hari dan disebut *miskin* untuk pendapatan di bawah US \$2 per hari. Kriteria Bank Dunia didasarkan pada pendapatan yang diperoleh masyarakat itu sendiri. Penghasilan US \$1,00 per hari dikalkulasikan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita/hari ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya, seperti sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi.

Sayogya mengembangkan standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Ada beberapa golongan: (a) golongan *paling miskin*, pendapatannya 240 kg atau kurang beras per kapita/tahun; (b) golongan *miskin sekali* dengan pendapatan 240 - 360 kg beras per kapita/tahun; dan (c) golongan *miskin* pendapatannya lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg beras per kapita/tahun.

Sedangkan Friedman dalam Bagong Suyanto (2005) mendefinisikan kemiskinan adalah ketidaksamaan dalam mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial itu berupa: (a) modal produktif atau aset, misalnya tanah, perumahan, peralatan, dan kesehatan; (b) sumber keuangan, seperti *income* dan kredit yang memadai; (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama; (d) *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan kete-

rampilan yang memadai; dan (e) informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Berbicara kemiskinan di negara yang mempunyai wilayah laut cukup luas tampaknya terasa aneh. Akan tetapi, persoalan kemiskinan selalu menarik diperbincangkan. Dari berbagai studi, ada beberapa ciri kemiskinan: (a) tidak memiliki faktor produksi sendiri; (b) tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri; (c) tingkat pendidikan rendah; (d) banyak di antara mereka yang tinggal di pedesaan, dan tidak mempunyai tanah garapan; (e) tidak mempunyai keterampilan atau *skill*. Kelima ciri di atas saling berkaitan yang berpengaruh kepada kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini, kemiskinan mempunyai kaitan erat dengan mata pencaharian seseorang atau keluarga, dan berkaitan juga dengan SDM yang mengakibatkan keluarga menjadi tidak sejahtera.

Menurut Raymond Firth dalam Sutawi dan David Darmawan (Kompas, 29/4/2003), kemiskinan nelayan paling tidak dicirikan menjadi lima karakteristik. *Pertama*, pendapatan nelayan bersifat harian (*daily increments*) dan jumlahnya sulit ditentukan dengan jumlah yang tergantung pada musim dan status nelayan itu sendiri. *Kedua*, tingkat pendidikan nelayan maupun anak-anak nelayan pada umumnya rendah. *Ketiga*, dihubungkan dengan sifat produk yang dihasilkan nelayan, maka nelayan lebih banyak berhubungan dengan ekonomi tukar-menukar karena produk tersebut bukan merupakan makanan pokok. *Keempat*, bidang perikanan membutuhkan investasi cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang besar dibandingkan sektor usaha lainnya. *Kelima*, kehidupan nelayan yang miskin juga diliputi oleh kerentanan.

Berdasarkan fenomena di atas, di antara penyebab kemiskinan yang mencolok adalah hubungan kerja antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap dalam organisasi penangkapan ikan, khususnya bagi hasil sangat berpengaruh terhadap tinggi-rendahnya pendapatan yang diperoleh nelayan penggarap.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan

Pemberdayaan memiliki pengertian proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan. Proses pemberian daya di sini dilakukan oleh pihak lain di luar pihak yang tidak berdaya tersebut. Pemberian daya tidak bisa dimaknai pihak yang tidak berdaya itu sama sekali tidak memiliki daya, tetapi daya yang dimiliki perlu ditambah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan kepada masyarakat nelayan agar ekonominya berdaya atau meningkat. Hakikat pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2004: 79) merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang (*anabling*). Winarni dalam Sulistiyani (2004: 79) mengungkapkan, inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu: pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian.

Maria Fraskho (2000) berpendapat, konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun sebagai kerangka logik sebagai berikut; (1) Proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan pengusaha pinggiran; (3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, politik, hukum dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; (4) Kooptasi sistem pengetahuan, hukum politik dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan disisi lain manusia dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

Sudut pandang yang berbeda tentang pemberdayaan adalah lahirnya dua pandangan yang konfliktual, berbeda dan bertolak belakang. Pandangan pertama adalah *zero-sum*

yang menganggap, daya yang dimiliki pemberi daya akan berkurang ketika memberdayakan atau memberi daya kepada pihak yang kurang berdaya. Daya itu mengalir atau berpindah sebagian atau seluruhnya dari pemberi daya kepada pihak yang diberi daya (Sumodiningrat dalam Sulistiyani, 2004:91), yang merujuk pada kekuasaan. Ketika penguasa memberikan sebagian (daya) kekuasaannya, maka kekuasaan pihak pertama tadi akan berkurang karena mengalir pada pihak yang diberi kuasa. Pandangan kedua adalah *positif-sum*. Pemberi daya akan memperoleh manfaat jika melakukan pemberdayaan terhadap pihak yang kurang berdaya. Daya yang dimiliki pemberi daya semakin kuat dan bermakna jika melakukan pemberdayaan. Manfaat yang bisa dilihat secara nyata dari pemberi daya, misalnya, pemberdayaan UKM oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan yang melakukan pemberdayaan akan memiliki 'anak' perusahaan yang akan ikut membesarkan perusahaan induknya. Meskipun tidak secara implisit digolongkan sebagai anak perusahaan, tetapi secara moral akan ikut membesarkan perusahaan pemberi daya.

Karl Marx berpandangan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya. Untuk memperoleh *surplus value* perlu pendistribusian penguasaan faktor-faktor produksi. Untuk mendapatkan apa yang dimaksud di atas, harus dilakukan melalui perjuangan politik. Dalam hal ini, kekuatan politik Karl Mark ada pada keberhasilannya dalam merencanakan pendistribusian faktor-faktor produksi yang dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat, atau sebaliknya, keberhasilannya dalam pendistribusian faktor-faktor produksi disebabkan keberhasilannya dalam penguasaan politik.

Sistem Bagi Hasil

Salah satu yang mengatur sistem bagi hasil adalah UU No.16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Sistem bagi hasil perikanan yang dilakukan masyarakat nelayan menarik dicermati. Perjanjian bagi hasil sebagaimana dalam UU No.16 Tahun 1964 adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan

atau pemeliharaan ikan antara juragan dan nelayan atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.

Lebih lanjut dalam UU BHP ditegaskan: Pembagian hasil di antara para nelayan dari bagian yang mereka terima diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (kini Kabupaten/Kota) setempat agar tidak terjadi pemerasan. Apabila ada perbandingan lain, maka perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) banding 1 (satu).

Dalam praktek bagi hasil, nelayan penggarap hanya menyediakan sumber daya manusia (tenaga kerja), sedangkan biaya segala keperluan selama persiapan dan operasional penangkapan diambil dari hasil kotor sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Adapun keperluan selama persiapan dan penangkapan ikan adalah: (1) biaya persiapan, keperluan membeli daun kelapa dan tali-temali untuk membuat terumbu ikan; (2) BBM berupa solar untuk perahu motor, bensin untuk mesin diesel lampu, kardan dan mesin pompa; (3) biaya makan, minum, dan rokok untuk nelayan selama proses penangkapan; (4) biaya perawatan dan perbaikan jaring, dsb.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Moleong adalah berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar (*grounded theory*), deskriptif. Sedangkan landasan teoretis pada penelitian kualitatif adalah fenomenologi, etnometodologi, etnografi, penelitian lapangan (*Field Research*), dan *grounded theory*. Pendekatan metode kualitatif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Peneliti menetapkan lokasi penelitian sistem bagi hasil nelayan di wilayah Madura. Subjek penelitian ini adalah nelayan, juragan, tengkulak, dan orang-orang yang terlibat da-

lam proses penangkapan ikan sampai pada penjualan hasil tangkapan. Tindakan yang mereka lakukan adalah: *Pertama*, proses penangkapan ikan, mulai dari persiapan melaut sampai pada penjualan hasil tangkapan; *Kedua*, kepemilikan usaha penangkapan, mulai dari pembuatan perahu/kapal dan peralatannya sampai dengan bagi hasil antara nelayan dengan juragan dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya; *Ketiga*, kesejahteraan mereka sesuai dengan kriteria sejahtera, sejahtera, atau sangat miskin dan miskin.

Informan penelitian yang ditetapkan peneliti adalah juragan, nelayan; Pemerintah Daerah dari keempat kabupaten di wilayah Madura, tokoh masyarakat, pemilik toko yang menyediakan peralatan untuk keperluan penangkapan ikan, dan masyarakat pesisir. Mereka banyak memiliki informasi dalam hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

HASIL PENELITIAN

Praktek Bagi Hasil Perikanan

Di Kabupaten Bangkalan juragan berbagi hasil dengan nelayan. Bagi hasil perikanan yang dipraktikkan sekitar 37,5% - 42% bagi hasil yang diperoleh juragan, dan sekitar 58% - 75% untuk nelayan. Sedangkan biaya operasional berupa BBM (bahan bakar minyak; solar) menjadi tanggungan juragan, kecuali variasi bagi hasil yang dipraktikkan nelayan Kwanyar yang diambil dari hasil kotor.

Bagi hasil yang dipraktikkan masyarakat nelayan Kabupaten Sampang yang umum dilakukan sekitar 40% - 62,5% untuk nelayan, dan sekitar 50% - 60% untuk juragan. Variasi bagi hasil yang tidak umum adalah 40% - 75% untuk nelayan dan 25% - 60% untuk juragan. Bagi hasil di atas diberlakukan untuk nelayan dengan menggunakan jaring trowl, tarik, dan umpan rajungan. Sedangkan untuk nelayan dengan menggunakan porse sein umumnya mempraktekkan bagi hasil sebesar masing-masing 50% untuk juragan dan nelayan.

Bagi hasil yang umum dipraktikkan nelayan Pamekasan adalah sekitar 45,5% - 67% untuk nelayan, dan sekitar 37% - 60% untuk juragan. Sedangkan variasi bagi hasil yang dilakukan kelompok nelayan Pamekasan ada-

lah: sekitar 47% - 75% untuk nelayan, dan sekitar 25% - 53% untuk juragan. Bagi hasil yang tinggi bagi nelayan atau yang dianggap berpihak pada nelayan adalah 62,5% untuk nelayan yang dipraktekkan masyarakat nelayan di Pesisir Bandaran. Bahkan variasi bagi hasilnya mencapai 75% untuk nelayan dan 25% untuk juragan. Hanya saja, variasi bagi hasil seperti tersebut mulai ditinggalkan oleh juragan karena merasa rugi dan tidak sesuai dengan nilai investasi yang dimiliki.

Bagi hasil yang umum dilakukan masyarakat nelayan Kabupaten Sumenep sekitar 33% - 90% untuk nelayan, dan sekitar 10% - 67% untuk juragan. Sedangkan variasi bagi hasil yang tidak umum dilakukan yang dipraktekkan oleh sebagian kelompok nelayan sekitar 40% - 60% untuk nelayan dan untuk juragan sekitar 40% - 60%. Bagi hasil dengan jaring porse sein membagi dua, masing-masing mendapatkan 50%. Tidak hanya itu, juragan tidak menanggung sendiri biaya operasional. Biaya BBM, biaya perawatan dan perbaikan alat tangkap menjadi tanggungan bersama dengan memotong hasil kotor. Sedangkan biaya makan, minum dan rokok menjadi tanggungan nelayan sendiri. Biasanya biaya untuk dinikmati nelayan sendiri dibawa dari rumah masing-masing.

Analisis Hasil Produksi Perikanan Tangkap

Di bawah ini disajikan tabel perbandingan nilai produksi perikanan tangkap laut, perikanan tangkap perairan umum, prosentase bagi hasil, pendapatan nelayan penggarap per tahun per orang dan per bulan per orang jika mengikuti ketentuan UU BHP, yaitu perolehan bagi hasil untuk juragan maksimal 60% dan minimal 40% untuk nelayan dari keseluruhan hasil bersih setelah dipotong biaya-biaya.

Tabel 1
Analisis Hasil Perikanan Tangkap Laut dan Perairan Umum

No.	Uraian Perbandingan	Bangkalan	Pamekasan	Sampang	Sumenep
1.	Produksi perikanan tangkap laut (satuan: Rp1.000)	183.801.040	271.939.660	109.693.328	932.199.923
2.	Produksi perikanan perairan umum (Rp1.000)	1.353.999	535.500	412.499	1.312.800
3.	Bagi hasil untuk juragan perikanan laut (Rp1.000)	110.280.624	163.163.796	65.817.196,8	559.319.953,8
4.	Bagi hasil untuk nelayan perikanan (Rp1.000)	73.520.416	108.775.864	43.878.131,2	372.879.969,2
5.	Jumlah nelayan tetap tangkap laut	5.253	14.608	20.078	27.478
6.	Jumlah nelayan lain	-	-	7.373	15.323
7.	Jumlah nelayan perairan umum	119	92	44	73
8.	Pendapatan nelayan tangkap laut/ tahun/orang (Rp)	13.995.891	7.446.321,46	2.185.383,00	13.570.127,70
9.	Pendapatan nelayan tangkap laut/ bulan/orang (Rp)	1.166.324,25	620.526,78	182.115,25	725.995,43
10.	Bagi hasil untuk juragan perairan umum (Rp1.000)	921.599,4	321.300	247.499,4	787.680
11.	Bagi hasil untuk nelayan perairan umum (Rp1.000)	541.599,6	214.200	164.999,6	525.120
12.	Pendapatan nelayan perikanan tangkap perairan umum/ orang/tahun (Rp)	4.551.257,14	2.328.260,86	3.749.990,90	7.193.424,65
13.	Pendapatan nelayan perairan umum/ orang/bulan (Rp)	379.271,42	194.216,69	312.499,24	599.452,00

Sumber : Hasil analisis perolehan dan prosentase bagi hasil Perikanan tangkap

Perbandingan Pendapatan Nelayan dengan UMK

Pendapatan nelayan Kabupaten Bangkalan pada usaha perikanan tangkap laut di atas UMK. Sedangkan pendapatan nelayan pada usaha perikanan tangkap perairan umum masih jauh di bawah UMK. Hal ini terbalik dengan sektor perikanan tangkap laut, pada perikanan tangkap perairan umum nilai produksinya sangat kecil dengan jumlah nelayan yang cukup besar. Pendapatan nelayan pada usaha perikanan tangkap laut Kabupaten Pamekasan per bulan masih di bawah UMK, sedangkan pendapatan nelayan pada usaha perikanan tangkap perairan umum sangat jauh di bawah UMK. Pendapatan nelayan pada usaha perikanan tangkap laut dan perairan umum Kabupaten Sampang jauh dari UMK, dan pendapatan nelayan pada usaha perikanan tangkap perairan umum tidak sampai 50% dari UMK. Pendapatan nelayan pada usaha perikanan tangkap laut kabupaten Sumenep hampir sesuai dengan UMK. Namun pada perikanan tangkap perairan umum, pendapatan nelayan jauh dari UMK.

Perbandingan pendapatan nelayan pada usaha perikanan tangkap laut dan perairan umum dengan UMK pada semua pesisir di wilayah Madura adalah jika sistem bagi hasil yang diperoleh nelayan sesuai dengan UU

BHP. Bagi hasil yang dimaksud di atas adalah peruntukan juragan maksimal sebesar 60% dan untuk nelayan minimal mendapatkan bagi hasil sebesar 40%. Itupun belum menghitung biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan harus menyesuaikan dengan ketentuan UU BHP.

Hubungan Pendapatan Nelayan dengan Kesejahteraan

Tabel di bawah ini adalah hubungan pendapatan nelayan dengan kesejahteraan keluarga menurut kriteria Bank Dunia dan Sayogya.

Tabel 2
Analisis Kesejahteraan Nelayan yang Membiayai Hidupnya Sendiri Menurut Bank Dunia dan Sayogya

No.	Jenis Nelayan dan Standar Kesejahteraan		Analisis Kesejahteraan Masyarakat Nelayan			
			Bangkalan	Pamekasan	Sampang	Sumenep
1.	Nelayan Tangkap Laut	Bank Dunia	Sejahtera	Sejahtera	<i>Sangat miskin</i>	Sejahtera
		Sayogya	Sejahtera	Sejahtera	Sejahtera	Sejahtera
2.	Nelayan Tangkap Perairan Umum	Bank Dunia	<i>Miskin</i>	<i>Sangat miskin</i>	<i>Miskin</i>	Sejahtera
		Sayogya	Sejahtera	Sejahtera	Sejahtera	Sejahtera

Hasil analisis dari data DKP Prov. Jatim (Data diolah Peneliti)

Tabel berikut juga mengukur kesejahteraan dari 2 pandangan, yaitu kriteria Bank Dunia dan pendapat Sayogya yang mengukur kesejahteraan dengan harga beras.

Tabel 3
Analisis Kesejahteraan Nelayan dengan Seorang Istri dan 2 Orang Anak Menurut Bank Dunia dan Sayogya

No.	Jenis Nelayan dan Standar Kesejahteraan		Analisis Kesejahteraan Masyarakat Nelayan			
			Bangkalan	Pamekasan	Sampang	Sumenep
1.	Tangkap Laut	Bank Dunia	<i>Miskin</i>	<i>Sangat miskin</i>	<i>Sangat miskin</i>	<i>Sangat miskin</i>
		Sayogya	Sejahtera	<i>Miskin</i>	<i>Paling miskin</i>	Sejahtera
2.	Perairan Umum	Bank Dunia	<i>Sangat miskin</i>	<i>Sangat miskin</i>	<i>Sangat miskin</i>	<i>Sangat miskin</i>
		Sayogya	<i>Paling miskin</i>	<i>Paling miskin</i>	<i>Paling miskin</i>	<i>Miskin</i>

Hasil analisis dari data DKP Prov. Jatim (Data diolah Peneliti)

Dari analisis di atas menunjukkan, kehidupan nelayan pada usaha perikanan tangkap laut dan perikanan perairan umum pada umumnya tergolong *tidak sejahtera* atau *miskin*, *sangat miskin* atau *paling miskin*. Meskipun nelayan itu tergolong *sejahtera* jika membiayai hidupnya sendiri, tapi pada Kenya-

taannya nelayan tersebut hidup dalam suatu keluarga yang hanya mengandalkan pendapatan suami.

Model Pemberdayaan Ekonomi

Ditemukan model pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang cukup efektif adalah pemberdayaan yang dilakukan *pangamba*; Pangamba' adalah orang yang membantu memasarkan atau menjual hasil usaha perikanan dan memiliki piutang kepada orang per seorangan nelayan dalam jumlah tertentu. Pangamba' meminjamkan sejumlah uang kepada nelayan. Uang itu biasanya untuk tambahan biaya hidup keluarga atau nelayan sendiri. Ada juga sebagai modal usaha kecil-kecilan untuk isteri atau keluarga nelayan. Misalnya sebagai modal berjualan ikan pingand atau ikan olahan. Juga berjualan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga.

Konpensasi dari piutang adalah hak penjualan hasil bagian ikan berupa *ceperan* milik nelayan diserahkan kepada pangamba' yang menjadi patnernya. Ikan tadi menjadi kewenangan pangamba' untuk dijual dengan harga berapa pun sesuai dengan harga pasar. Kemudian pangamba' memberikan hasil penjualan ikan kepada nelayan tadi. Perlu diketahui, di beberapa pesisir di Madura mempraktekkan *ceperan*, adalah bagian ikan yang diberikan kepada setiap nelayan dengan jumlah yang sama. Pembagian itu tidak dipengaruhi oleh struktur kerja dalam sebuah rombongan perahu. *Ceperan* itu sebagai lauk untuk keluarga nelayan. Sebagian dari *ceperan* itu diserahkan kepada pangamba' untuk dijual, dan sebagian kecil dibawa pulang untuk lauk di rumah.

Pangamba' sebagai Marketer

Pangamba' sebagai tulang punggung pemasaran hasil usaha perikanan dapat didefinisikan sebagaimana definisi pemasaran, yaitu suatu proses sosial manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Definisi ini berdasarkan pada konsep inti berupa kebutuhan, keinginan dan

permintaan; pasar, pemasaran dan pemasar. William J Stanton, mendefinisikan pemasaran adalah keseluruhan intern yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli baik pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Dalam hal perannya sebagai marketer, pangamba' telah membantu memasarkan hasil usaha perikanan. Tentu karena sebagai marketer, pangamba' mengambil untung dari hasil pekerjaannya.

Pangamba' sebagai Pemberdaya

Pangamba' dalam bekerja sama sebagai marketer memberikan sejumlah kompensasi (berupa uang) kepada nelayan penggarap. Kompensasi yang diberikan pangamba' merupakan salah satu pendukung pemberdayaan ekonomi kepada kelompok nelayan. Meskipun sebenarnya perlakuan tersebut tidak direncanakan secara sistematis, tapi pada kenyatannya juragan yang umumnya tidak terlibat dalam usaha perikanan menjadi berdaya. Sebagian wanita nelayan memperlakukan (uang) hasil kompensasi sebagai modal membuka usaha kecil-kecilan, dan pada Kenyatannya tidak sedikit dari mereka yang berhasil (sukses).

Dalam penelitian ini, peneliti menganggap perlakuan yang dilakukan pangamba' sebagai model pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Madura yang penyebaran dan perlakuannya perlu ditingkatkan. Peneliti menemukan beberapa kasus pemberdayaan ekonomi yang dianggap berhasil dan berdaya bagi sebagian besar wanita nelayan porse sein dan slerek. Meskipun usaha yang dilakukan wanita nelayan tadi tergolong usaha kecil, namun mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara sederhana. Oleh karena itu, peneliti menganggap model pemberdayaan yang dilakukan pangamba' adalah model pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang paling sesuai dengan kondisi dan karakteristik nelayan Madura.

PENUTUP

Dari analisis praktek bagi hasil perikanan, masyarakat nelayan Madura tidak tunduk pada ketentuan UU No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (UU BHP), dan/atau *Fiqhul Islam* yang berupa *syirkah*, dan hanya masyarakat nelayan di Pesisir Ambunten pada variasi bagi hasil yang memenuhi ketentuan UU BHP, dan itupun hanya beberapa kelompok nelayan saja yang belakangan ini jarang diterapkan. Jika praktek bagi hasil yang diterapkan masyarakat nelayan Madura sesuai dengan ketentuan UU BHP, pendapatan nelayan rata-rata/orang/bulan pada perikanan tangkap laut Bangkalan Rp1.166.324,25, Sumenep Rp725.995,43, Pamekasan Rp620.526,78 dan Sampang Rp182.115,25, dan sektor perikanan perairan umum nelayan Sumenep Rp599.452,00, Bangkalan Rp379.271,42, Sampang Rp312.499,24 dan Pamekasan Rp194.216,69.

Pendapatan nelayan tersebut berpengaruh pada penghitungan: (a) pada perbandingan UMK; yaitu pendapatan nelayan Kabupaten Bangkalan di atas UMK pada perikanan tangkap laut dan di bawah UMK sektor perikanan perairan umum, dan pendapatan nelayan tangkap laut dan perairan umum Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Sumenep di bawah UMK; (b) kesejahteraan menurut kriteria Bank Dunia, jika nelayan membiayai isteri dan 2 orang anak pada perikanan tangkap laut Kabupaten Bangkalan tergolong *miskin*, dan Pamekasan, Sampang dan Sumenep tergolong *sangat miskin*, dan nelayan perairan umum di Madura tergolong *sangat miskin*; (c) kriteria kesejahteraan menurut Sayogya, nelayan pada sektor perikanan tangkap laut Kabupaten Bangkalan dan Sumenep tergolong *sejahtera*, Pamekasan tergolong *miskin*, dan Sampang tergolong *paling miskin*. Sedangkan nelayan perairan umum Kabupaten Sumenep tergolong *miskin*, serta Bangkalan, Pamekasan dan Sampang tergolong *paling miskin*.

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang paling sesuai dengan karakter dan kondisi masyarakat Madura adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh pangamba'. Pangamba' terdiri atas pangamba' perseorangan dan pangamba' kelompok. Pangamba' perseorangan adalah model pemberdayaan

ekonomi yang paling sesuai dengan masyarakat nelayan. Dalam melakukan pemberdayaan, pangamba' tidak merencanakan secara sistematis tetapi berjalan apa adanya. Pangamba' perseorangan memberikan sejumlah kompensasi kepada nelayan penggarap yang menjadi mitra kerjanya, yang oleh sebagian keluarga nelayan dijadikan modal dalam membuka usaha. Dari beberapa kasus yang ada, keluarga nelayan yang membuka modal usaha dari uang kompensasi pangamba' perseorangan mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Sementara pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah melalui berbagai macam program pemberdayaan belum mencerminkan hasil untuk penguatan ekonomi masyarakat nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Alfabeta, Bandung
- Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Timur. 2011. *Buku Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2010*. DKP Jatim, Surabaya
- . 2011. *Laporan Tahunan Statistik Perikanan Budidaya Tahun 2010*. DKP Jatim, Surabaya
- . 2012. *Statistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2011*. DKP Jatim, Surabaya
- Sumber:<http://www.kompas.com/kompascetak/0402/10/ekonomi/847162.htm>
- Kartasmita, G. 1997. *Administrasi Pembangunan*. LP3ES, Jakarta
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2007. Terj. *Analisis Data Kualitatif – Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Moleong, J. Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif–edisi revisi*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mubyarto. 1998. *Reformasi Sistem Ekonomi: dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Aditya Media, Yogyakarta
- . 2002.. “Ekonomi Kerakyatan dalam Era Globalisasi”. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Nomor :Th. I - No. 7 - September 2002
- Murdiyanto, B. 2004. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pantai*. Cofish Project, Jakarta
- Siswanto, Budi. 2008. *Nelayan dan Politik Perikanan*. Papyrus, Surabaya
- Solihin, Akhmad., dkk. 2005. *Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Humaniora, Bandung
- . *Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan*